

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak akhir 2019 atau lebih tepatnya pada bulan desember 2019 Indonesia mulai menghadapi pandemi covid-19, dan selama itu banyak hal yang telah berubah akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemic tersebut. Dampak pandemi itu sendiri bukan hanya mengarah kepada kesehatan masyarakat, akan tetapi juga menghambat banyak aktivitas sehingga dampak yang ditimbulkan mempengaruhi beberapa hal atau beberapa sektor seperti contohnya di sektor perekonomian dimana pada sektor tersebut kegiatan perusahaan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu, bahkan tidak sedikit perusahaan yang berhenti untuk selamanya akibat kebijakan pembatasan sosial yang mana tentunya mengganggu kegiatan perusahaan dan mempengaruhi pendapatan perusahaan tersebut, hal itu dilakukan tentunya untuk menghindari penyebaran dan penularan Virus Covid-19. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari website fiscal kemenkeu yang berjudul “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik” tindakan tersebut berdampak kepada karyawan yang bekerja di perusahaan, salah satu contohnya adalah terjadinya PHK terhadap karyawan karena perusahaan tidak sanggup membayar akibat kurangnya pendapatan. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa terhentinya kegiatan perusahaan akan memperlemah ekonomi negara secara tidak langsung, bahkan menurut artikel

“Strategi Pengelolaan Kas Negara di Masa Pandemi COVID-19” pada website kemenkeu hal itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah melalui APBN menjadi tidak stabil.

Kita ketahui bahwa pandemi covid-19 secara tidak langsung berpengaruh kepada APBN. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan pendapatan serta banyaknya pengeluaran pemerintah terutama pada bidang kesehatan. kondisi ini membuat pemerintah bergerak untuk melakukan perbaikan pada postur APBN. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan pada pendapatan negara terutama sektor pajak.

Pajak sendiri merupakan suatu kontribusi kepada negara yang wajib dilakukan oleh setiap individu atau orang pribadi atau suatu badan yang mana memiliki sifat yang memaksa namun didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut, serta tidak adanya imbalan secara langsung setelah pembayaran pajak dilakukan dan pajak tersebut nantinya dipergunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak perlu dilakukan karena fungsinya sebagai pemasukan yang akan digunakan oleh negara untuk membantu rakyat dalam berbagai hal, termasuk kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti pandemi covid-19. Oleh karena itu kegiatan perpajakan harus terus dilakukan demi kestabilan anggaran yang tentunya demi kemakmuran rakyat. Agar pelaksanaan

pajak dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan mekanisme pemeriksaan atau audit terhadap kegiatan pajak tersebut.

Berdasarkan website Pajak dan Online pajak, pemeriksaan atau audit pajak adalah suatu kegiatan dalam perpajakan yang di dalamnya meliputi proses pengumpulan, pencarian, pengolahan dan pengoreksian suatu data yang mana objek dari pemeriksaan itu adalah wajib pajak, dan berguna untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai undang-undang.

Dari pengertian pemeriksaan atau audit pajak ini tentunya dapat diketahui bahwa dilaksanakannya audit pajak bertujuan untuk menilai bagaimana kepatuhan pemenuhan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Namun akibat pandemi covid-19 pada akhir 2019 atau awal 2020, pelaksanaan audit pajak menjadi sangat sulit dan membutuhkan penyesuaian. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pembatasan sosial demi mengurangi lonjakan penularan covid-19, agar kegiatan pelaksanaan audit pajak ini dapat berjalan selama pandemi tentunya diperlukan beberapa perubahan atau penyesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan audit pajak. Hal tersebut terjadi terutama di KPP Pratama yang merupakan tempat yang sangat penting dalam melakukan audit pajak.

Dari latar belakang ini penulis ingin meneliti serta melihat pada salah satu KPP Pratama bagaimana pelaksanaan audit pajak dilakukan. sehingga penulis ingin memasukan ke dalam karya tulis, dengan judul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 DALAM PELAKSANAAN AUDIT PAJAK OLEH KPP PRATAMA INDRAMAYU.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang penulisan KTTA di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persamaan dan perbedaan antara praktik audit pajak selama dengan sebelum pandemi covid-19?
2. Kendala apa saja yang terjadi pada saat melakukan audit selama masa pandemi?
3. Langkah apa saja yang diambil untuk menaggulangi kendala selama masa pandemi agar kualitas audit tetap tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui apakah persamaan dan perbedaan antara praktik audit pajak selama dengan sebelum pandemi covid-19?
2. Mengetahui kendala apa saja yang ditemui oleh auditor pajak selama pelaksanaan audit pajak pada masa pandemi.

3. Mengetahui langkah apa saja yang diambil untuk menaggulangi kendala selama masa pandemi agar kualitas audit tetap tinggi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dari penulisan karya tulis ini sendiri, dibatasi hanya dalam melakukan tinjauan dampak pandemi covid-19 dalam pelaksanaan audit pajak pada wajib pajak pada KPP Pratama Indramayu pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dimana penulis mengambil kedua tahun ini sebagai data terupdate dari KPP Pratama Indramayu. Serta jarak tempat tinggal penulis yang tidak jauh dari lokasi objek karya tulis ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis bagi para auditor dalam mengembangkan tehnik audit saat terjadi keadaan tidak normal, seperti pandemi.
2. Manfaat bagi penelitian berikutnya adalah sebagai refrensi untuk melakukan penelitian pada kantor pelayanan pajak lainnya atau dalam mengembangkan tehnik audit tertentu pada masa yang tidak normal, seperti masa pandemi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan berisikan latar belakang penulis dalam membuat karya tulis, rumusan masalah yang menjadi dasar pencarian dan penjelasan dalam penulisan KTTA, tujuan penulisan yang menyatakan apa yang akan penulis capai dalam penulisan KTTA, ruang lingkup penulisan yang menjadi batasan penulisan, manfaat penulisan dari karya tulis, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, serta sistematika penyajian karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan karya tulis, dan beberapa hal mengenai profil singkat dari KPP Pratama Indramayu, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPP Pratama sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan data-data yang diperoleh serta hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan instansi yang dijadikan objek penelitian, selain itu jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada BAB I akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB IV SIMPULAN

Merupakan bagian terakhir dari penulisan KTTA yang akan berisi kesimpulan yang dibuat penulis berdasarkan isi dari bab-bab yang telah penulis buat serta berisikan pendapat/opini penulis atas penelitian yang penulis lakukan